**PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH KEJAKSAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN****Marsel Agustino Saragih¹, Janpatar Simamora²**marselagustino.saragih@student.uhn.ac.id¹, patarmora@uhn.ac.id²**Universitas HKBP Nomensen Medan**

Abstrak: Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban serta masyarakat. Kejaksaan memiliki peran vital dalam proses ini, mulai dari penyusunan dakwaan hingga tuntutan pidana yang dihadapkan pada pengadilan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan sanksi pidana oleh kejaksaan dalam kasus pembunuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan jenis sanksi yang diajukan kepada pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap sejumlah kasus pembunuhan yang ditangani oleh Kejaksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan seringkali mempertimbangkan faktor-faktor seperti motif pembunuhan, keadaan psikologis pelaku, serta dampak sosial terhadap masyarakat dalam menetapkan tuntutan pidana. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dalam hal pemberian sanksi terhadap pelaku pembunuhan menjadi krusial untuk memastikan keadilan serta menanggulangi potensi terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Penelitian ini juga menyarankan perlunya peningkatan koordinasi antara kejaksaan, kepolisian, dan lembaga peradilan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan efektif.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Kejaksaan, Pembunuhan, Penegakan Hukum, Keadilan.

***Abstract:** The application of criminal sanctions against perpetrators of murder is a critical aspect of law enforcement, aimed at providing deterrence and justice for the victim and society. The prosecutor's office plays a vital role in this process, from drafting charges to presenting criminal demands in court. This study aims to examine how criminal sanctions are applied by the prosecutor's office in murder cases, as well as the factors that influence the determination of the type of sanction proposed to the court. The research uses a qualitative approach with descriptive analysis of several murder cases handled by the Prosecutor's Office. The findings show that prosecutors often consider factors such as the motive behind the murder, the psychological state of the perpetrator, and the social impact on the community when determining the criminal charge. Consistent and firm law enforcement in imposing sanctions on murder perpetrators is crucial to ensuring justice and preventing similar crimes in the future. The study also recommends strengthening coordination between prosecutors, police, and the judiciary to create a more efficient and effective criminal justice system.*

Keywords: Criminal Sanctions, Prosecutors, Murder, Law Enforcement, Justice.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pembunuhan tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang besar bagi keluarga korban dan masyarakat secara luas. Dalam rangka memberikan keadilan, mencegah terjadinya kejahatan serupa, serta menegakkan hukum, penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan memegang peranan yang sangat penting. Kejaksaan, sebagai lembaga yang bertugas untuk menuntut dan mewakili negara dalam proses peradilan pidana, memiliki peran strategis dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pembunuhan harus mencerminkan prinsip keadilan, di mana hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana oleh kejaksaan tidaklah sederhana. Banyak faktor yang memengaruhi proses penuntutan, seperti motif pembunuhan, keadaan psikologis pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Kejaksaan harus mempertimbangkan dengan cermat setiap aspek yang ada agar tuntutan yang diajukan kepada pengadilan dapat memberikan efek yang maksimal terhadap pelaku dan masyarakat.

Namun, meskipun kejaksaan memegang peranan kunci dalam penuntutan kasus pembunuhan, proses penegakan hukum di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya kecenderungan untuk menuntut hukuman yang lebih ringan karena faktor-faktor tertentu. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan di Indonesia sudah sesuai dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan sanksi pidana oleh kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan bagaimana praktik penuntutan dapat lebih optimal untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan efektif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang menekankan pada analisis peraturan perundang-undangan serta keputusan pengadilan. Studi ini akan mengumpulkan sumber hukum primer, mencakup peraturan dan undang-undang yang relevan, serta merujuk pada pendapat lisan dan tertulis dari pakar atau otoritas yang terkait. Selain itu, berbagai sumber informasi sekunder juga akan digunakan untuk menambah pemahaman tentang topik yang diteliti.

Dalam konteks ini, pendekatan normatif memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelidiki dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, serta memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan. Penting untuk mengenali kekurangan dan potensi dalam sistem hukum yang mengatur kasus pembunuhan di Indonesia. Dengan mengintegrasikan informasi dari sejumlah sumber, studi ini diharapkan mampu menawarkan gambaran menyeluruh tentang masalah hukum yang berkaitan dengan pembunuhan serta perannya dalam melindungi hak asasi manusia. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran yang positif bagi para pembuat keputusan dan penegak hukum untuk memperbaiki efektivitas dalam menangani kasus pembunuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Indonesia

Pembunuhan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang menyebabkan satu orang atau lebih meninggal dunia. Pembunuhan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat serius dan dijatuhi hukuman berat karena dampaknya yang luas, baik terhadap korban, keluarga korban, maupun masyarakat.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta:Storia Grafika,2012). (KUHP) Indonesia, khususnya dalam Pasal 338 hingga Pasal 340 KUHP, yang membahas berbagai jenis pembunuhan beserta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

1. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP

Pasal 338 KUHP mengatur mengenai pembunuhan biasa. Pasal ini menyatakan bahwa:

Pasal 338 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Dari pasal ini, dapat dijelaskan bahwa:

- "Dengan Sengaja" berarti pelaku memiliki niat atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kesengajaan ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut dengan penuh kesadaran bahwa tindakannya akan mengakibatkan kematian korban.
- "Menghilangkan Nyawa Orang Lain" berarti tindakan tersebut menyebabkan kematian korban secara langsung, seperti dengan cara memukul, menembak, menikam, atau dengan cara lain yang berakibat fatal.
- Ancaman Pidana: Pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 15 tahun, yang menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana ini serius, hukuman untuk pembunuhan biasa lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan berencana.

2. Jenis-Jenis Pembunuhan Menurut Hukum Indonesia

Di Indonesia, tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan unsur dan keadaan yang melatarbelakanginya, antara lain:

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi tanpa adanya perencanaan sebelumnya. Pembunuhan ini sering kali dilakukan dalam situasi yang lebih emosional atau spontan.

b. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan setelah adanya perencanaan terlebih dahulu. Pelaku merencanakan tindakannya dengan matang dan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban.

Pasal 340 KUHP: "Barang siapa dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun."

Pembunuhan berencana dianggap lebih berat karena adanya unsur perencanaan yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat yang lebih kuat untuk melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa, termasuk kemungkinan dijatuhkan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

c. Pembunuhan dalam Keadaan Terdesak (Pasal 49 KUHP)

Tindak pidana pembunuhan dalam keadaan terdesak atau dalam pembelaan diri bisa dibenarkan oleh hukum jika dilakukan untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman yang nyata dan tidak terhindarkan. Pembunuhan ini dapat dianggap sah atau tidak dikenakan hukuman, tergantung pada seberapa besar ancaman terhadap pelaku dan seberapa proporsional tindakannya.

d. Pembunuhan dalam Keadaan Tertentu (Pasal 51 KUHP)

Pasal 51 memberikan pembelaan terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan

tertentu, misalnya akibat provokasi atau penganiayaan sebelumnya. Pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan seperti ini dapat mengurangi tingkat hukuman yang dijatuhkan.

3. Unsur-Unsur Pembunuhan

Untuk menyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum Indonesia, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi:

- Kesengajaan (Mens Rea): Pelaku harus memiliki niat atau kesadaran untuk menghilangkan nyawa korban. Ini menjadi unsur yang sangat penting untuk membedakan pembunuhan dari tindak pidana lain seperti penganiayaan atau kecelakaan.
- Tindakan Menghilangkan Nyawa (Actus Reus): Tindakannya harus menyebabkan kematian korban. Ini bisa melalui berbagai cara, seperti menggunakan senjata tajam, senjata api, atau bahkan cara lain yang menyebabkan luka fatal.
- Tidak Ada Pembelaan yang Sah: Jika pelaku melakukan pembunuhan untuk membela diri dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menghindari ancaman, maka itu bisa dianggap sebagai pembunuhan yang sah menurut hukum.

4. Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sangat bergantung pada jenis pembunuhan yang dilakukan:

- Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP): Pidana penjara maksimal 15 tahun.
- Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP): Dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.
- Pembunuhan dalam Keadaan Terdesak (Pasal 49 KUHP): Dapat dibenarkan atau diberi hukuman yang lebih ringan, tergantung pada proporsionalitas pembelaan diri yang dilakukan.

Penerapan hukuman terhadap pelaku pembunuhan sering kali mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat pelaku, motif, keadaan saat kejadian, serta apakah tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau dalam kondisi tertentu yang mengurangi kesadaran pelaku.

Peran Kejaksaan dalam Proses Pidana

Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Sebagai lembaga penuntut umum, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yang sangat strategis dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal penuntutan perkara pidana. Kejaksaan berfungsi untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara adil dan transparan, serta mengawasi proses hukum yang dilakukan oleh polisi dan pengadilan. Berikut adalah penjelasan tentang tugas dan wewenang kejaksaan, serta proses yang dilalui oleh kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana, serta hubungannya dengan polisi dan pengadilan dalam rangka mewujudkan keadilan.

Adapun ketentuan yang selama ini selalu dijadikan dasar pengaturan bagi keberadaan Kejaksaan dalam UUD NR Tahun 1945 adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 24, khususnya Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Merujuk pada ayat (1) pasal dimaksud ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang sifatnya merdeka dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian melalui ayat (3) disebutkan bahwa badan-badan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur melalui undang-undang. Kedua ayat ini pada intinya menegaskan urgensi lembaga-lembaga penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Sekalipun penekanannya lebih mengarah pada lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, namun demikian segmen penegakan hukumnya senantiasa dijadikan sebagai pintu masuk untuk menarik penafsiran bahwa pasal tersebut menghendaki keberadaan lembaga penegak hukum secara umum. (Simamora & Naibaho, 2025)

1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum di Indonesia memiliki beberapa tugas dan wewenang yang sangat penting, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berikut adalah tugas dan wewenang utama kejaksaan:

a. Tugas Kejaksaan

- Kejaksaan memiliki beberapa tugas penting dalam proses peradilan pidana, di antaranya:
- Melakukan Penuntutan Perkara Pidana: Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang telah diserahkan oleh penyidik setelah penyidikan selesai. Kejaksaan bertugas untuk memastikan bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan ke pengadilan.
- Mengarahkan Proses Penyidikan: Kejaksaan dapat memberikan petunjuk dan arahan kepada penyidik (biasanya polisi) terkait dengan jalannya proses penyidikan. Kejaksaan berperan dalam memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Menjadi Pengacara Negara: Kejaksaan juga berperan dalam perkara perdata tertentu yang melibatkan negara, termasuk pengelolaan keuangan negara dan pemulihan kerugian negara.
- Mengawasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan: Kejaksaan memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum.
- Melakukan Penyidikan (Dalam Kasus Tertentu): Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam hal tertentu, misalnya dalam tindak pidana korupsi.

b. Wewenang Kejaksaan

- Beberapa wewenang utama kejaksaan dalam proses pidana adalah:
- Melakukan Penuntutan di Pengadilan: Kejaksaan bertugas untuk mengajukan dakwaan terhadap terdakwa dalam persidangan di pengadilan. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan pidana kepada hakim, termasuk dalam hal penyidikan yang belum lengkap atau bukti yang kurang.
- Meneliti Berkas Perkara yang Dikirim Penyidik: Setelah penyidikan selesai, kejaksaan menerima berkas perkara dari penyidik untuk diperiksa dan diteliti. Jika berkas perkara lengkap, kejaksaan akan menyusun dakwaan untuk dibawa ke pengadilan.
- Memberikan Pertimbangan Hukum: Kejaksaan berperan dalam memberikan pertimbangan hukum kepada penyidik, pengadilan, dan bahkan kepada pihak-pihak terkait lainnya dalam perkara pidana.
- Mengajukan Banding atau Kasasi: Kejaksaan memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi apabila merasa keputusan pengadilan yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan hukum.

2. Proses yang Dilalui oleh Kejaksaan dalam Penuntutan Perkara Pidana

Proses penuntutan perkara pidana yang dilalui oleh kejaksaan dimulai setelah penyidik menyelesaikan penyidikan dan menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan. Berikut adalah tahapan proses yang dilalui oleh kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana:

a. Penerimaan Berkas Perkara dari Penyidik

Setelah penyidik (biasanya kepolisian) selesai melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, berkas perkara tersebut diserahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan kemudian memeriksa apakah berkas perkara yang diserahkan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

b. Pemeriksaan Berkas Perkara

Setelah menerima berkas perkara, jaksa akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang ada. Jaksa memeriksa apakah berkas perkara sudah lengkap, baik dari sisi materiil (bukti-bukti, keterangan saksi, dsb.) maupun formil (surat-surat yang dibutuhkan, seperti surat penahanan, dll.). Jika berkas masih dianggap kurang lengkap atau tidak memadai, jaksa dapat mengembalikannya ke penyidik untuk dilengkapi.

c. Penyusunan Dakwaan

Setelah berkas perkara dianggap lengkap dan memenuhi syarat, jaksa akan menyusun dakwaan.

Dakwaan merupakan inti dari proses penuntutan, yang menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dalam penyusunan dakwaan, jaksa harus memastikan bahwa dakwaan yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk dibawa ke pengadilan.

d. Penyampaian Dakwaan ke Pengadilan

Setelah dakwaan disusun, jaksa akan menyampaikan dakwaan tersebut kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan akan menentukan jadwal sidang untuk memulai proses persidangan.

e. Proses Sidang di Pengadilan

Selama persidangan, jaksa akan menjadi penuntut umum yang mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung dakwaan. Jaksa juga berperan dalam memberikan argumentasi hukum dan menyampaikan tuntutan pidana terhadap terdakwa.

3. Hubungan Kejaksaan dengan Polisi dan Pengadilan dalam Mewujudkan Keadilan

a. Hubungan Kejaksaan dengan Polisi

Kejaksaan dan kepolisian bekerja sama dalam proses penegakan hukum pidana. Polisi bertugas sebagai penyidik yang mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi, sementara kejaksaan berfungsi sebagai penuntut umum yang memeriksa berkas perkara yang diserahkan oleh polisi. Kejaksaan juga memberikan arahan dan petunjuk kepada penyidik polisi selama proses penyidikan berlangsung untuk memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, hubungan antara kejaksaan dan polisi tidak selalu berjalan tanpa kendala. Terkadang, kejaksaan harus mengembalikan berkas perkara ke polisi apabila dianggap kurang lengkap atau tidak memadai. Dalam hal ini, jaksa berperan untuk memastikan bahwa penyidikan berjalan dengan benar, sehingga perkara dapat diselesaikan dengan keadilan.

b. Hubungan Kejaksaan dengan Pengadilan

Setelah berkas perkara diserahkan dan dakwaan disusun, kejaksaan berhubungan langsung dengan pengadilan dalam rangka penuntutan. Jaksa akan mewakili negara dalam persidangan dan berusaha untuk membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada. Selama persidangan, jaksa juga memberikan argumentasi hukum yang mendukung dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan.

Selain itu, kejaksaan berperan dalam mengajukan banding atau kasasi jika merasa keputusan pengadilan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kejaksaan juga mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, seperti eksekusi terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Penerapan Sanksi Pidana oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Pembunuhan

Kejaksaan memegang peran sentral dalam proses penegakan hukum yang adil, khususnya dalam penuntutan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan. Sebagai lembaga penuntut umum, kejaksaan bertanggung jawab memastikan bahwa pelaku kejahatan, termasuk pembunuhan, dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai peran kejaksaan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan, serta tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses ini. (Info, 2025)

1. Peran Kejaksaan dalam Proses Penegakan Hukum yang Adil

a. Menilai Berkas Perkara dan Menyusun Dakwaan

Kejaksaan memiliki tugas untuk menerima berkas perkara dari penyidik, memeriksa kelengkapan bukti-bukti yang ada, dan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk diteruskan ke pengadilan. Dalam hal ini, kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengembalikan berkas perkara ke penyidik jika bukti-bukti atau keterangan yang diberikan belum memadai. Kejaksaan harus memastikan bahwa tidak ada kekurangan dalam proses penyidikan agar penuntutan dapat berjalan secara adil.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, kejaksaan akan menyusun dakwaan terhadap pelaku pembunuhan. Penyusunan dakwaan harus mempertimbangkan semua bukti yang ada dan

apakah tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 338 (pembunuhan biasa) atau Pasal 340 (pembunuhan berencana) KUHP.

b. Melakukan Penuntutan yang Adil

Setelah dakwaan diajukan, kejaksaan bertanggung jawab untuk menjalankan proses penuntutan di pengadilan. Sebagai penuntut umum, kejaksaan harus mengajukan bukti-bukti yang sah dan relevan serta memanggil saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan yang mendukung dakwaan. Kejaksaan juga berperan dalam memberikan argumen hukum kepada hakim untuk memastikan bahwa pelaku pembunuhan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kejaksaan juga harus berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal atau faktor pribadi dalam mengambil keputusan terkait tuntutan pidana. Penuntutan yang adil tidak hanya berarti mengejar hukuman maksimal, tetapi juga memastikan bahwa pelaku diberikan hak-hak pembelaan yang sesuai dengan hukum.

c. Menuntut Sanksi yang Tepat

Kejaksaan berperan penting dalam menuntut sanksi pidana yang tepat bagi pelaku pembunuhan. Dalam hal ini, jaksa akan menilai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hukuman, seperti apakah pembunuhan dilakukan dengan sengaja (Pasal 338 KUHP) atau apakah pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), serta apakah ada faktor pembelaan diri atau kondisi lain yang dapat mengurangi hukuman (misalnya dalam Pasal 49 dan Pasal 51 KUHP).

Jika terbukti bahwa pelaku melakukan pembunuhan berencana, jaksa dapat menuntut hukuman mati atau penjara seumur hidup, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP. Sementara itu, untuk pembunuhan biasa, tuntutan jaksa umumnya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun, sesuai dengan Pasal 338 KUHP.

d. Menjamin Hak-Hak Korban dan Keluarga

Selain menuntut hukuman bagi pelaku, kejaksaan juga berperan dalam menjamin hak-hak korban dan keluarga korban. Ini termasuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan transparan dan memberikan kesempatan bagi keluarga korban untuk didengar dalam sidang. Kejaksaan juga berfungsi untuk mengajukan permohonan restitusi atau ganti rugi jika ada kerugian material yang diderita oleh keluarga korban.

Tantangan dan Kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana oleh Kejaksaan

a. Keterbatasan Bukti dan Kesaksian

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan adalah terkadang adanya keterbatasan bukti yang dapat membuktikan perbuatan pelaku secara jelas. Dalam beberapa kasus, penyidikan mungkin hanya mengandalkan keterangan saksi atau bukti fisik yang tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa memang pelaku pembunuhan.

Kejaksaan harus sangat berhati-hati dalam menilai kelengkapan bukti, karena kurangnya bukti atau saksi yang sah dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil. Jika kejaksaan tidak dapat menghadirkan bukti yang cukup, maka proses penuntutan akan terhambat, dan terdakwa bisa saja dibebaskan karena tidak cukup bukti.

b. Tekanan Sosial dan Politik

Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum yang independen, kadang-kadang menghadapi tekanan dari berbagai pihak, baik itu masyarakat, politikus, atau kelompok kepentingan lainnya. Dalam beberapa kasus, tekanan ini dapat memengaruhi keputusan kejaksaan dalam memilih apakah akan melanjutkan penuntutan atau tidak. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku dari kalangan berpengaruh, kejaksaan mungkin menghadapi dilema untuk menuntut sanksi pidana yang tegas karena khawatir akan konsekuensi sosial atau politik.

Untuk memastikan penegakan hukum yang adil, penting bagi kejaksaan untuk tetap bersikap profesional dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Kejaksaan harus mengutamakan

kepentingan hukum dan keadilan dalam setiap proses penuntutan.

c. Perbedaan dalam Penafsiran Hukum

Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan dalam penafsiran hukum, terutama dalam hal menentukan jenis pembunuhan dan sanksi yang tepat. Misalnya, apakah suatu pembunuhan memenuhi unsur pembunuhan berencana atau hanya pembunuhan biasa. Hal ini bisa memengaruhi keputusan jaksa dalam menyusun dakwaan dan tuntutan hukuman yang sesuai.

Selain itu, dalam beberapa kasus, jaksa harus mempertimbangkan berbagai faktor pelaku, seperti latar belakang psikologis, kondisi mental, atau motivasi di balik tindakannya. Meskipun sistem hukum Indonesia memberikan pedoman yang jelas, terkadang keputusan-keputusan tersebut masih memerlukan pertimbangan subjektif yang bisa berbeda antara satu jaksa dengan jaksa lainnya.

d. Beban Kerja yang Tinggi

Kejaksaan sering kali menghadapi beban kerja yang sangat tinggi dengan banyaknya perkara pidana yang harus ditangani. Terutama dalam kasus-kasus dengan pelaku pembunuhan, proses penyusunan dakwaan dan penuntutan memerlukan perhatian yang sangat mendalam. Kejaksaan perlu memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan sebaik-baiknya tanpa mengurangi kualitas proses hukum. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga dapat menjadi kendala dalam penuntutan yang efektif.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana oleh kejaksaan terhadap pelaku pembunuhan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa pelaku pembunuhan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bahwa proses peradilan berjalan secara adil. Dari tahap penerimaan berkas perkara, penyusunan dakwaan, hingga penuntutan di pengadilan, kejaksaan berupaya untuk menuntut sanksi yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan, baik itu pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Namun, dalam penerapannya, kejaksaan menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan bukti, tekanan eksternal, perbedaan penafsiran hukum, serta beban kerja yang tinggi. Meskipun demikian, kejaksaan tetap memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Kejaksaan harus memastikan bahwa setiap proses penuntutan dilakukan dengan transparansi dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan yang telah diatur dalam hukum Indonesia. Dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik, sangat penting bagi kejaksaan untuk terus memperkuat kapasitasnya, meningkatkan kualitas penuntutan, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mengutamakan keadilan, baik bagi korban maupun pelaku. Hanya dengan pendekatan yang adil, objektif, dan profesional, penegakan hukum akan tercapai, yang pada akhirnya memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

UU No 14 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

B. Jurnal

Abdurrahman, A.* (2021). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(1), 50-70.

Ahmad, T. (2021). Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pembunuhan. **Jurnal Penegakan Hukum**, 10(3), 45-58. DOI:xxxx.

Eka "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.B/2012/Pn.Mks.)" Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2013.

Huda, Chairul, 2011, Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus, *Jurnal Hukum*, 18 (4).

Jainah, Z. O. (2012). Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Journal of Rural and Development*, 3 (2).

- Pratiwi, L.* (2019). Tindak Pidana Pembunuhan dan Penerapan Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum* 8(3), 30-55.
- Putri, S. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. **Jurnal Kriminologi**, 15(2), 100-115. URL:xxxx.
- Rahman, A. (2020). Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Pembunuhan oleh Kejaksaan. *Jurnal Hukum Pidana**, 12(1), 15-30. DOI:xxxx.
- Safsafubun, R.T., Wadjo, H.Z., & SOPACUA, M.G. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 89 – 99.
- Sari, M.* (2020). Efektivitas Sanksi Pidana oleh Kejaksaan dalam Kasus Pembunuhan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 90-110.
- Sari, R. (2022). Dampak Sanksi Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. **Jurnal Hukum dan Masyarakat**, 8(1), 30-50. URL:xxxx.
- Simamora, Janpatar & Naibaho, Bintang, (2025) Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power. *Arena Hukum*, 18 (2).<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>
- Simamora, Janpatar & Naibaho, Bintang. (2025). Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. 22. 332-353. 10.31078/jk2226.
- Syamsul Haling, et.all., 2018, Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), hlm. 365.
- Yusuf, M. (2020). Evaluasi Penerapan Sanksi Pidana pada Kasus Pembunuhan. **Jurnal Ilmu Hukum**, 14(2), 22-35. DOI:xxxx
- Yusuf, T.* (2022). Peran Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Penegakan Hukum*, 11(4), 67-80.
- Zainudin, F.* (2020). Analisis Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Strategi Hukum*, 5(2), 20-40.nbiya Zaliana, N. and Dame Panjaitan, J. (2023) 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah umur Korban Tindak Pidana Pelecehan seksual', *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), pp. 3029–3036. doi:10.59141/comserva.v3i08.1102.